

JURNAL

**MANAJEMEN PENDARATAN IKAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

**OLEH
DAUD HASIAN JOEL**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2017**

JURNAL

**MANAJEMEN PENDARATAN IKAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Sarjana
pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau*

OLEH

**DAUD HASIAN JOEL
NIM. 1304115371**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2017**

**Manajemen Pendaratan Ikan
Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
Provinsi Jawa Barat**

Daud Hasian Joel¹⁾, Jonny Zain²⁾, Pareng Rengi²⁾

¹⁾Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

²⁾Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

daud_hasian@yahoo.com

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan April 2017 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Provinsi Jawa Barat. Penelitian bertujuan mengetahui penyebab perbedaan pelaksanaan pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu dengan panduan pengelolaan tata cara pendaratan ikan Direktorat Bina Prasarana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu dengan melakukan pengamatan unsur – unsur dan fungsi manajemen yang berkaitan dengan fasilitas dan aktivitas pendaratan ikan yang ada di PPN Palabuhanratu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pelaksanaan aktivitas pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu dengan panduan tata cara pendaratan ikan Direktorat Bina Prasarana. Pertama, kapal-kapal yang akan merapat akan diberikan nomor antrian dan petugas menentukan tempat pembongkaran, namun yang terjadi kapal tersebut merapatkan kapal nya di dermaga bongkar tanpa pengawasan petugas pelabuhan. Kedua, kapal mendaratkan ikan di dermaga bongkar depan TPI dan ketika selesai melakukan pembongkaran kapal tersebut seharusnya di pindahkan ke dermaga tambat kapal, namun yang terjadi selesai melakukan bongkar hasil tangkapan, kapal tersebut tidak langsung dipindahkan menuju tempat parkir kapal, melainkan memarkirkan kapal nya di dermaga bongkar tersebut. Sehingga kapal lain melakukan pembongkaran di dermaga tambat.

Kata kunci: Pendaratan Ikan, Manajemen, Palabuhanratu

**Fish landing management
Fishery Port of Palabuhanratu
West Java province**

Daud Hasian Joel¹⁾, Jonny Zain²⁾, Pareng Rengi²⁾

¹⁾Student of Fisheries and Marine Faculty, University of Riau

²⁾Lecture of Fisheries and Marine Faculty, University of Riau

daud_hasian@yahoo.com

This research was conducted in March until April 2017 at Fishery Port of Nusantara Palabuhanratu West Java Province. The purpose of this research is to know the cause of difference of fish landing implementation in PPN Palabuhanratu with guidance of fishery landing fishery management of Directorate of Infrastructure. The method used in this research is survey method, that is by observing the elements - elements and management functions associated with fish landing facilities and activities in the VAT Palabuhanratu. From the results of the research indicate that there are differences in the implementation of fish landing activity in the VAT Palabuhanratu with guidance of fish landing method Directorate of Infrastructure Development. First, the ships that will be docked will be given the queue number and the officer determines the demolition site, but the ship is closing its vessel on the dock unloading without the supervision of the port officer. Secondly, the ship landed the fish at the front loading pier of TPI and when it was completed the demolition of the vessel was supposed to be transferred to the boat mooring dock, but that happened finished unloading the catch, the ship was not directly transferred to the parking lot of the ship, but parked his ship on the dock Unloading it. So the other vessels do the demolition at the mooring dock.

Keywords: Fish Landing, Management, Palabuhanratu

Manajemen Pendaratan Ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Provinsi Jawa Barat

Daud Hasian Joel¹⁾, Jonny Zain²⁾, Pareng Rengi²⁾

³⁾Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

⁴⁾Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

This research was conducted in March until April 2017 at Fishery Port of Nusantara Palabuhanratu West Java Province. The purpose of this research is to know the cause of difference of fish landing implementation in PPN Palabuhanratu with guidance of fishery landing fishery management of Directorate of Infrastructure. The method used in this research is survey method, that is by observing the elements - elements and management functions associated with fish landing facilities and activities in the VAT Palabuhanratu. From the results of the research indicate that there are differences in the implementation of fish landing activity in the VAT Palabuhanratu with guidance of fish landing method Directorate of Infrastructure Development. First, the ships that will be docked will be given the queue number and the officer determines the demolition site, but the ship is closing its vessel on the dock unloading without the supervision of the port officer. Secondly, the ship landed the fish at the front loading pier of TPI and when it was completed the demolition of the vessel was supposed to be transferred to the boat mooring dock, but that happened finished unloading the catch, the ship was not directly transferred to the parking lot of the ship, but parked his ship on the dock Unloading it. So the other vessels do the demolition at the mooring dock.

Keywords: Fish Landing, Management, Palabuhanratu

PENDAHULUAN

Kabupaten Sukabumi adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Palabuhanratu. Dengan luas wilayah 4.128 km², Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Batas wilayah Kabupaten Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu) adalah salah satu pelabuhan perikanan yang dibangun pemerintah pusat guna menunjang aktivitas perikanan seperti melayani kapal-kapal yang sedang melakukan operasi penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan (fishing ground), melakukan pelayanan terhadap kapal-kapal perikanan baik untuk keberangkatan maupun pada saat kedatangan dan saat berada di pelabuhan, memfasilitasi kegiatan pendaratan ikan dan pengelolaan ikan guna mempertahankan mutu ikan yang didaratkan.

Perbedaan antara pelaksanaan aktivitas pendaratan ikan yang ada di Pelabuhan

Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan aturan yang seharusnya berlaku akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi operasional PPN Palabuhanratu. Perbedaan antara SOP dan pelaksanaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain kondisi fasilitas, jumlah pengelola, etos kerja pengelola dan faktor lainnya sehingga melalui penelitian ini akan dicarikan solusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April 2017 di PPN Palabuhanratu Provinsi Jawa Barat. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kamera, *stopwatch*, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh di lokasi penelitian. Bahan yang digunakan berupa kuisioner yang digunakan untuk bertanya kepada nelayan dan insransi terkait dengan judul penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei.

Prosedur Penelitian

• Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan antara lain data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh Pengamatan langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan kondisi fasilitas – fasilitas serta aktivitas yang ada ditempat pendaratan ikan kemudian Melakukan wawancara kepada responden yaitu dengan cara membagikan kuisioner. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu PPN Palabuhanratu (dasar – dasar operasional, fasilitas pendaratan ikan, struktur organisasi pengelola aktivitas pendaratan ikan, unit penangkapan ikan seperti : armada, alat tangkap, produksi, jumlah nelayan).

- **Analisis Data**

Data yang dikumpulkan ditabulasikan kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan membandingkan penerapan manajemen pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu yang ada dengan panduan pengelolaan pendaratan ikan menurut Direktorat Bina Prasarana (1994). Data yang dikumpulkan disusun dan diuraikan bila terdapat perbedaan pelaksanaan fungsi dan penerapan manajemen di PPN Palabuhanratu dengan ketentuan yang ada maka akan di carikan penyebab perbedaannya sehingga masalah-masalah yang dijumpai dapat dicari alternatif pemecahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

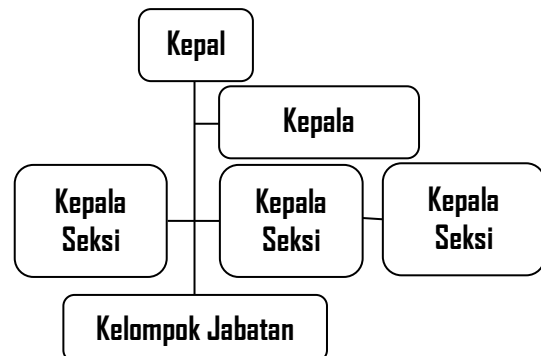
Keadaan Umum Daerah Penelitian

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu) berada di kecamatan Palabuhanratu berada di Kabupaten Sukabumi yang memiliki delapan Desa atau Kelurahan diantaranya Desa Palabuhanratu, Citarik, Citepus, Cibodas, Pasirsuren, Cikadu, Tonjong, dan Banyuwangi. Secara astronomi wilayah Palabuhanratu berada pada 106° 31 BT – 106° 37 BT dan antara 6° 57 LS – 7° 04 LS, secara administratif Kecamatan Palabuhanratu berbatasan langsung dengan Kecamatan Cikakak dan Cikondang di sebelah utara, Kecamatan Cimanggu disebelah timur, Kecamatan Simpenan di sebelah selatan dan Teluk Palabuhanratu sebelah Barat.

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Susunan organisasi PPN Palabuhanratu sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan. Adapun susunan organisasi di PPN Palabuhanratu dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: PPN Palabuhanratu, 2016

- **Seksi Operasional Pelabuhan**

Seksi Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.

- **Kepala Seksi Kesyahbandaran**

Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu petugas pelabuhan dari Seksi Operasional pelabuhan bertugas untuk melakukan inspeksi pembongkaran ikan yang bekerja sama dengan seksi kesyahbandaran untuk mencatat kedatangan kapal, sedangkan dalam proses distribusi dan pemasaran di kelola oleh Sub bagian Tata Usaha.

Fasilitas Pelabuhan di PPN Palabuhanratu

Berikut adalah fasilitas yang membantu aktivitas pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu :

- **Dermaga**

PPN Palabuhanratu memiliki 2 dermaga yang berfungsi sebagai tempat kapal bertambat, sebagai tempat bongkar muat dan

juga untuk aktivitas pendaratan ikan. Dermaga di PPN ini dikelola langsung oleh pihak pelabuhan, dan dermaga ini memiliki konstruksi jeti yang terbuat dari beton, memiliki *bolder* yang terbuat dari beton dengan ukuran tinggi 40 cm dan diameter 30 cm. *Fender* yang terbuat dari bahan karet dengan ukuran panjang 100 cm dan diameter luar 50 cm serta diameter dalam 25 cm. Dermaga 1 memiliki panjang 509 meter, di sediakan untuk kapal yang bertambat berukuran kurang dari 10 GT. Sedangkan dermaga 2 memiliki panjang 410 meter, khusus untuk kapal yang berukuran lebih dari 10 GT.

- **Kolam Pelabuhan**

Pada PPN Palabuhanratu memiliki 2 kolam pelabuhan, kolam pelabuhan I yang terletak di depan kantor pengelola PPN Palabuhanratu, dan kolam pelabuhan II yang terletak di depan kantor Badan Pengawas Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Pada Kolam dermaga 1 memiliki luas 30.000 m² dan memiliki kedalaman 1,5 m sampai 2,5 m sedangkan kolam 2 memiliki luas 20.000 m² dan memiliki kedalaman 3,5 m sampai 4 m.

- **Tempat Pelelangan Ikan**

Bangunan TPI PPN Palabuhanratu berada di dermaga I PPN Palabuhanratu, tepatnya di depan dermaga pendaratan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu. Tempat pelelangan ikan ini memiliki luas 920 m² dan pengelolaan TPI ini dilakukan oleh KUD MSL (Mina Sinar Laut).

Unit Penangkapan Ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

- **Kapal**

Jenis kapal penangkapan ikan yang beroperasi di PPN Palabuhanratu pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Kapal	Jumlah (unit)
1	Perahu Motor Tempel	333
2	Kapal Motor	227
Jumlah		560

Sumber: Buku Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tangkap 2016 (data diolah kembali)

- **Alat Tangkap**

Jenis alat penangkapan ikan yang dioperasikan di PPN Palabuhanratu pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah (unit)
1	Payang	41
2	Dogol	28
3	Jaring Insang	3
4	Jaring Rampus	30
5	Pancing Tonda	100
6	Pancing Ulur	246
7	Long Line	57
8	Bagan Apung	125
Jumlah		630

Sumber: Buku Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tangkap 2016 (data diolah kembali)

- **Nelayan**

Jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
2012	5112
2013	5081
2014	4072
2015	4000
2016	1437

Sumber: Buku Laporan Tahunan Statistik Perikanan Tangkap 2016 (data diolah kembali)

Kegiatan dan Aktivitas

- **Produksi Ikan**

Produksi ikan merupakan gambaran yang ada di dalam dan di wilayah kerja PPN Palabuhanratu. Produksi ikan tersebut adalah hasil tangkapan kapal perikanan yang didaratkan di pelabuhan serta produksi ikan yang masuk dari luar pelabuhan melalui darat dan dipasarkan ke perusahaan yang ada di dalam lokasi pelabuhan.

• **Aktivitas Pendaratan Ikan**

Aktivitas pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Palabuhanratu Sukabumi dilakukan setiap hari dan jam melakukan pendaratan ikan dimulai pukul 08.00 WIB. Aktivitas pendaratan hasil tangkapan meliputi pembongkaran hasil tangkapan, penyortiran, dan pengangkutan. Pembongkaran hasil tangkapan dilakukan di dua dermaga pembongkaran yang tersedia. Berikut adalah aktivitas pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu :

1. Pendaratan ikan di kolam 1 PPN Palabuhanratu untuk kapal yang berukuran dibawah 6 GT di lakukan di dermaga tambat, Ikan tersebut tidak di bawa ke tempat pelelangan di karenakan hasil tangkapannya berjumlah sedikit, namun akan dibawa ke pengumpul lalu akan di bawa ke PT yang ada di PPN Palabuhanratu untuk di pasarkan.

2. pendaratan ikan di kolam 1 PPN Palabuhanratu untuk kapal berukuran 10 GT melakukan pembongkaran di dermaga bongkar di depan TPI agar mempermudah mengangkut ikan menuju TPI, kemudian dilakukan penyortiran, lalu ikan tersebut akan dimasukkan kedalam tong yang kemudian di bawa ke TPI untuk melakukan proses pelelangan. Di dalam proses pelelangan, juru lelang akan menawarkan harga kepada para pembeli, ketika harga sudah tercapai maka ikan tersebut akan menjadi pemilik pembeli tersebut.

3. Pendaratan ikan di kolam 2 PPN Palabuhanratu khusus untuk kapal diatas 10 GT, pembongkaran dilakukan di tempat kapal tersebut tambat, ikan di dikeluarkan dari palkah, kemudian Ikan tersebut akan dikeluarkan menuju dek kapal, setelah dari dek kapal, akan di teruskan ke dermaga menggunakan papan panjang dengan cara di luncurkan, kemudian dimasukkan es ke dalam ikan tersebut untuk mempertahankan kualitas tuna tersebut lalu dimasukkan ke dalam mobil box yang sudah di lapiisi oleh es yang kemudian di bawa menuju jakarta.

Pada PPN Palabuhanratu, aktivitas pendaratan ikan belum berjalan dengan lancar. Hal ini dapat di lihat dari perbedaan aktivitas pendaratan ikan yang sebenarnya

No	Bulan	Jumlah ikan (kg)	
		Tahun	
		2015	2016
1	Januari	941.697	1.048.216
2	Februari	619.133	514.008
3	Maret	582.889	536.176
4	April	701.496	572.952
5	Mei	1.074.079	914.047
6	Juni	1.240.977	1.168.243
7	Juli	727.744	1.312.412
8	Agustus	410.135	621.668
9	September	717.588	703.195
10	Oktober	985.647	785.104
11	November	873.037	551.916
12	Desember	882.681	1.394.313

Total	9.757.103	10.122.250
--------------	------------------	-------------------

dengan panduan tata cara pendaratan ikan Direktorat Bina Prasarana. Ketika kapal merapat, pada dermaga 1 dan dermaga 2 tidak mendapatkan nomor antrian untuk melakukan pembongkaran. Seharusnya pihak pelabuhan memberikan nomor antrian kepada kapal yang ingin melakukan pembongkaran agar tidak berebut untuk bongkar ikan sesuai dengan panduan pengelolaan pelabuhan direktorat bina prasarana (1994) kapal yang telah merapat di dermaga harus diberikan nomor antrian untuk pengaturan bongkar ikan di dermaga.

Petugas mencatat hasil tangkapan pada dermaga 1 dan dermaga 2, namun pihak petugas pelabuhan tersebut tidak menentukan tempat untuk membongkar ikan kepada kapal yang ingin membongkar. Seharusnya petugas mengatur tempat untuk kapal yang ingin membongkar agar waktu untuk pembongkaran dapat dimaksimalkan. Dalam panduan pengelolaan pelabuhan direktorat bina prasarana (1994), seharusnya Petugas dermaga pelabuhan menentukan tempat pembongkaran ikan dan selanjutnya kapal perikanan segera melakukan pembongkaran ikan dan petugas dermaga mencatat waktu bongkar untuk menghitung biaya tambatnya.

Pada kolam dermaga 2, kapal melakukan pembongkaran hasil tangkapan dimana tempat kapaal tersebut bertambat, ini dikarenakan kolam dermaga 2 tidak memiliki

dermaga khusus untuk pembongkaran. Sedangkan pada kolam dermaga 1, selesai melakukan bongkar hasil tangkapan di dermaga bongkar, kapal tersebut tidak langsung dipindahkan menuju tempat parkir kapal, melainkan memarkirkan kapal nya di dermaga bongkar tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan panduan pengelolaan pelabuhan direktorat bina prasarana (1994) yang menyatakan bahwa setelah menyelesaikan kegiatan bongkar ikan, nahkoda kapal wajib memindahkan kapal ketempat/dermaga istirahat/labuh kapal. Hal ini menyebabkan kapal-kapal lain tidak bisa membongkar ikan di dermaga bongkar di depan TPI, sehingga mereka membongkar ikan di dermaga tempat parkir kapal. Seharusnya semua pembongkaran dilakukan di dermaga bongkar agar hasil tangkapan bisa di bawa menuju ke TPI untuk dilelang, sesuai dengan pendapat Bismuttantya (2016) bahwa Fungsi pokok dermaga bongkar ialah untuk memberikan kemudahan pelayanan bongkar hasil tangkapan ikan yang diangkut langsung ke TPI untuk menjaga kondisi higienis dan mencegah penurunan mutu, maka pelaksanaan bongkar perlu dilakukan pelayanan secepat mungkin dan jarak angkut dari kapal hingga TPI diusahakan sependek mungkin. Disarankan agar selalu tersedia ruang kosong sepanjang dermaga sedekat mungkin dengan TPI.

Ketika membongkar di dermaga tambat, petugas akan mencatat hasil namun ikan-ikan hasil tangkapan tersebut yang seharusnya di bawa ke TPI untuk dilelang tidak dibawa ke TPI, akan tetapi ikan tersebut langsung dibawa ke pengolah/PT yang ada di PPN Palabuhanratu. Ditambah lagi, keterlambatan pembayaran oleh petugas lelang dalam proses pembayaran kepada pembeli atau pemenang lelang yaitu nelayan, hal ini menyebabkan nelayan tidak ingin lagi menjual hasil tangkapannya melalui kegiatan pelelangan. Hal ini menyebabkan nelayan tidak mau melelang hasil tangkapan nya di TPI.

Pada kolam dermaga 1, ditemukan beberapa nelayan melakukan perbaikan jaring diatas kapal dan melakukan perbaikan kapal saat bertambat di kolam dermaga. Hal ini dapat mengganggu kelancaran keluar/masuk kapal, sesuai dengan panduan pengelolaan

pelabuhan direktorat bina prasarana (1994) yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang melakukan kegiatan tambat/labuh di dermaga pelabuhan dilarang melakukan kegiatan perbaikan kapal di dermaga kolam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pelaksanaan aktivitas pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu dengan panduan tata cara pendaratan ikan Direktorat Bina Prasarana (1994). Pertama, kapal-kapal yang akan merapat akan diberikan nomor antrian dan petugas menentukan tempat pembongkaran, namun yang terjadi kapal tersebut merapatkan kapal nya di dermaga bongkar tanpa pengawasan petugas pelabuhan.

Kedua, kapal mendaratkan ikan di dermaga bongkar depan TPI dan ketika selesai melakukan pembongkaran kapal tersebut seharusnya di pindahkan ke dermaga tambat kapal, namun yang terjadi selesai melakukan bongkar hasil tangkapan, kapal tersebut tidak langsung dipindahkan menuju tempat parkir kapal, melainkan memarkirkan kapal nya di dermaga bongkar tersebut. Sehingga kapal lain melakukan pembongkaran di dermaga tambat.

Saran

Kepada pihak pelabuhan, menambah jumlah pegawai yang bertugas untuk mencatat hasil pendaratan ikan dan memberikan ketegasan kepada pihak nelayan dalam hal mendaratkan ikan, bongkar muat, dan juga dalam hal parkir kapal. Kepada pihak nelayan yang berada di PPN Palabuhanratu untuk mematuhi peraturan yang di buat agar aktivitas pendaratan ikan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Perikanan, 1994. Tentang petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan. Jakarta.
- Haro., S. B.T. Surbakti, S dan Nurhasanah. 2014. Kajian Pran Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Hamadi. Jurnal Manajemen Perikanan dan Kelautan Vol. 1 No. 1. Hal 12-18.

- Joel, 2016. Aktivitas pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Laporan Praktek Magang Pada Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru. 48 hal.
- Lubis, E. 2000. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan dan Ilmu kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor. 72 hal.
- Manullang, M. 1981. Dasar – Dasar Manajemen. Ghalia Indonesia. Jakarta. 189 hal.
- Malik, B.A. 1998. Prospek pembangunan Perikanan di daerah Sumatera Utara. Medan. Hal 158-185.
- Permen KP No 16 tahun 2016. Tentang Kartu Nelayan.
- Septemberiani, 2009. Skripsi Pelabuhan Perikanan. Jakarta. 59 hal.
- Sibarani, E.A. 2006. Manajemen Pangkalan Pendaratan Ikan Batubara Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru. 60 hal.
- Supriatna, 1993. Skripsi Pelabuhan Perikanan. Jakarta. 63 hal.
- UU Perikanan NO. 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan. Jakarta.
- Yahya, E. Rosyid, A dan Suherman, A. 2013. Tingkat Pemanfaatan fasilitas dasar dan Fungsional Dalam Strategi Peningkatan Produksi Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah. Jurnal Pemanfaatan Sumberdaya Manajemen dan teknologi Perikanan. Vol 2 No 1. Hal 9-13.
- Zain, J. Syaifudin. Alit, H. 2011. Pelabuhan Perikanan. Pusat Pembangunan dan Pendidikan. Universitas Riau. Pekanbaru. 176 hal.